

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini berisi simpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan peneliti sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. Bab V mengemukakan jawaban-jawaban permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah penelitian skripsi ini.

5.1 Simpulan

Pertama, keadaan politik di Indonesia tahun 1968-1974 merupakan keadaan politik dengan kebijakan-kebijakan yang baru dari pemerintahan yang baru. Soeharto sebagai presiden yang baru menetapkan sistem politik yang berbeda dengan pemerintahan Soekarno sebelumnya. Pada masa Soeharto ini, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berorientasikan kepada pembangunan perekonomian negara sehingga hal ini berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Segala aspek dalam negara, baik itu aspek ekonomi, politik, sosial-budaya merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maka dari itu, segala kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi yang menjadi tujuan atau fokus utama pemerintah. Soeharto melakukan beberapa kebijakan penting dalam menghadapi keadaan Indonesia pasca pemerintahan Soekarno yang terbilang cukup meninggalkan banyak permasalahan dalam maupun luar negeri.

Kebijakan dalam negeri yang dilakukan oleh Soeharto di Indonesia pada tahun 1968-1974 antara lain Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) di Irian Barat tahun 1969, Pemilihan Umum 1971, dan Fusi Partai 1973. Sedangkan untuk kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Soeharto di Indonesia pada tahun 1968-1974 adalah menerima bantuan dana pembangunan dari IGGI (*Inter-Governmental Group on Indonesia*) dan membangun hubungan dengan bangsa Jepang. Kebijakan-kebijakan politik tersebut dapat dikatakan sebagai kebijakan yang besar dan cukup

Rurry Rafa'nilla, 2019

**PANDANGAN MOCHTAR LUBIS DALAM SURAT KABAR INDONESIA RAYA
TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1968-1974**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengundang banyak sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya dari kalangan pers terutama Mochtar Lubis dari surat kabar *Indonesia Raya*.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berpengaruh terhadap hubungan yang terjalin antara pihak pers dan pemerintah yang tidak jarang juga membawa suatu keputusan yang merugikan bagi pers. Pada tahun 1968-1974 hubungan pers dan pemerintah mengalami kenaikan dan penurunan. Hubungan baik

Rurry Rafa'nilla, 2019

**PANDANGAN MOCHTAR LUBIS DALAM SURAT KABAR INDONESIA RAYA
TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1968-1974**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berawal pada tahun 1966 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966 yang kemudian disusul dengan adanya SIT (Surat Izin Terbit) untuk surat kabar *Indonesia Raya* pada tahun 1968. Hubungan baik ini tidak berlangsung lama sampai terjadinya pemberedelan kembali pada tahun 1974 setelah peristiwa Malari 1974.

Kedua, padangan Mochtar Lubis terhadap kebijakan-kebijakan politik dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto pada tahun 1968-1974 di Indonesia seperti Pepera Irian Barat 1969, Pemilihan Umum 1971 dan Fusi Partai tahun 1973 mendapat pandangan yang berbeda dari Mochtar Lubis. Pandangan yang diberikan memang tidak selalu pro terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pepera Irian Barat tahun 1969 dalam pandangan Mochtar Lubis merupakan suatu kebijakan yang baik yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pepera Irian Barat tahun 1969 dianggap sebagai suatu upaya untuk mendapatkan hak Indonesia atas wilayah yang telah menjadi penjanjian dengan Belanda yang akan menyerahkan seluruh wilayah bekas jajahannya termasuk Irian Barat. Pepera Irian Barat tahun 1969 ini dianggap sebagai suatu awal yang baik yang telah dilakukan oleh pemerintah meskipun dianggap oleh Mochtar sebagai kemenangan dengan strategi pemerintah yang cukup berani.

Mochtar Lubis dalam melihat kebijakan politik dalam negeri lainnya yang dilakukan oleh pemerintah memberikan pandangan berbeda. Sikap kontra terhadap pemerintahan Soekarno ini yang kemudian membawa pengaruh terhadap pandangannya terhadap segala kebijakan yang dilakukan Soeharto terutama yang masih mempertahankan segala unsur dari pemerintahan yang lama, termasuk Pemilihan Umum 1971. Pemilihan umum ini dianggap Mochtar sebagai pemilihan umum yang kental dengan hasil '*warisan*' dari pemerintahan Soekarno. Anggapan sebagai hasil '*warisan*' ini memang bukan tanpa alasan, terutama dilihat dari sebagian partai Politik yang ikut serta dalam pemilihan umum 1971 yang merupakan partai-partai hasil dari pemerintahan Soekarno yaitu NU, PSII, Perti, PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, MURBA. Sedangkan partai yang baru hanya Parmusi dan Golkar.

Rurry Rafa'nilla, 2019

**PANDANGAN MOCHTAR LUBIS DALAM SURAT KABAR INDONESIA RAYA
TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1968-1974**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selanjutnya, padangan Mochtar Lubis terhadap fusi partai mendapat pandangan pro dan juga kontra. Partai-partai yang mengikuti pemilihan umum 1971 kemudian digabungkan menjadi tiga partai besar yang kemudian akan mengikuti pemilihan umum selanjutnya. Partai-partai tersebut yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang dibentuk dari partai-partai berhaluan Islam, PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan Golkar. Mengenai fusi partai ini dianggap sebagai kebijakan yang baik dilakukan jika mengingat kepada permasalahan perekonomian Indonesia, namun menurut Mochtar fusi partai ini cukup disayangkan karena menyatukan partai-partai berdasarkan ideologi yang dianut seperti PPP yang merupakan partai yang berasal dari partai-partai berhaluan agama Islam.

Ketiga, pandangan terhadap kebijakan-kebijakan politik luar negeri di Indonesia seperti menerima bantuan dari IGGI (*Inter-Governmental Group on Indonesia*) dan juga membangun hubungan baik dengan bangsa Jepang memang mendapat tanggapan yang kurang baik dari Mochtar Lubis. Kebijakan ini dianggap membawa cukup banyak kerugian yang diakibatkan oleh pihak Indonesia yang kurang bisa mengelolanya. Ketika Indonesia menerima bantuan dari IGGI (*Inter-Governmental Group on Indonesia*), Mochtar menganggap bahwa bantuan ini tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh Indonesia. Mochtar juga menganggap seharusnya Indonesia lebih dahulu harus mampu mengelola sumber daya alam yang sebenarnya dimiliki oleh Indonesia sebagai modal dalam masalah pembangunan yang sedang diupayakan.

Kebijakan luar negeri lainnya yang mendapat sorotan kurang baik dari Mochtar Lubis adalah mengenai hubungan yang dijalin oleh Indonesia dengan Jepang. Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Jepang memang terjalin sudah lama. Salah satu pilar utama yang telah mengikat Indonesia dan Jepang adalah adanya persamaan persepsi antara kedua negara yang menginginkan adanya stabilitas, perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Namun yang tidak dapat di lupakan adalah sejarah antara Indonesia dengan Jepang yang memang tidak baik terutama dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara tidak langsung memang membawa sikap sentimental yang mendalam. Hal

Rurry Rafa'nilla, 2019

**PANDANGAN MOCHTAR LUBIS DALAM SURAT KABAR INDONESIA RAYA
TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1968-1974**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tersebut yang juga membawa pandangan-pandangan yang kurang baik terhadap hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Jepang. Sikap sentimen ini kemudian diperparah dengan kenyataan bahwa perekonomian Indonesia berada pada keadaan adanya campur tangan Jepang. Hubungan antara Indonesia-Jepang ini sampai kepada terjadinya suatu peristiwa bentrokan besar yang terjadi pertama kali pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1974 yang disebut sebagai peristiwa Malari. Peristiwa tersebut yang kemudian berdampak besar terhadap kehidupan pers pada masa Soeharto. Dilakukan pemberedelan terhadap beberapa surat kabar termasuk surat kabar *Indonesia Raya* dan juga penangkapan terhadap Mochtar Lubis selaku pemimpin redaksi.

5.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dalam mata pelajaran sejarah wajib kelas XII kurikulum 2013, terdapat Kompetensi Dasar (KD) Nomor 3.7 yaitu mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Kompetensi Dasar tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru dan berbeda bagi peserta didik khususnya mengenai sejarah pandangan seorang tokoh. Selanjutnya melalui penelitian ini peserta didik diharapkan mampu mengetahui pandangan Mochtar Lubis terhadap kebijakan politik di Indonesia pada tahun 1968-1974.
2. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai pandangan Mochtar Lubis dalam surat kabar *Indonesia Raya* terhadap kebijakan politik di Indonesia tahun 1968-1974 sehingga dengan demikian penelitian tersebut diharapkan dapat menambah wawasan khazanah sejarah mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintah pada masa pemerintahan Orde Baru dari tokoh pers.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah yang ingin melakukan penelitian sejenis. Selama melakukan penelitian, ternyata masih banyak permasalahan

Rurry Rafa'nilla, 2019

**PANDANGAN MOCHTAR LUBIS DALAM SURAT KABAR INDONESIA RAYA
TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1968-1974**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang perlu dikaji lebih lanjut, misalnya aspek ekonomi pada tahun 1968-1974 dalam sudut pandang Mochtar Lubis. Minimnya kajian tersebut dapat dijadikan peluang untuk melakukan penelitian sehingga akan menghasilkan penelitian yang menarik.

Rurry Rafa'nilla, 2019

***PANDANGAN MOCHTAR LUBIS DALAM SURAT KABAR INDONESIA RAYA
TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1968-1974***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu